

Sarekat Islam sebagai Gerakan Islam: Transformasi Ideologi dan Strategi Politik di Pulau Jawa (1916–1934)

Muhamad Raafie Rayyan

Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin dan Adab,

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: raafirayyan19@gmail.com

Abstrak

Sarekat Islam (SI), yang berawal dari Sarekat Dagang Islam (SDI) pada 1905, merupakan tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini mengalami transformasi dari gerakan ekonomi ke arah politik Islam modern. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika ideologi dan strategi politik SI di Pulau Jawa antara tahun 1916–1934, periode penting ketika organisasi ini mencapai puncak pengaruhnya sekaligus menghadapi fragmentasi internal. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, serta didukung oleh teori perubahan sosial (Spencer & Marx), teori gerakan sosial Islam (Quintan Wiktorowicz), dan teori mobilisasi politik (Charles Tilly). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sarekat Islam berhasil mengintegrasikan Islam dan nasionalisme dalam satu wadah perjuangan politik. Transformasi ideologinya dari ekonomi ke politik Islam bersifat evolutif (Spencer) sekaligus konflikual (Marx). Dalam kerangka Wiktorowicz dan Tilly, SI memanfaatkan peluang politik dari kebijakan Politik Etis dan Volksraad, mbingkai perjuangan dalam narasi keislaman dan keadilan sosial, serta memobilisasi jaringan sosial-ekonomi umat melalui media dan organisasi massa. Namun, sejak 1920-an SI menghadapi tantangan berupa infiltrasi ideologi kiri dan represi kolonial, yang menyebabkan fragmentasi internal hingga melemah pada 1934.

Kata Kunci: Sarekat Islam, Ideologi, Politik, Gerakan Islam, Nasionalisme, Hindia Belanda

Pendahuluan

Islam sudah memainkan peranan politik dan ideologis yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi jalannya sejarah Indonesia, jarak antara islam dan politik sangatlah

tipis, jadi politik islam di Indonesia sangatlah kental walaupun islam datang secara bertahap-tahap Namun kandungan politik Islam terasa sejak awal perkembangannya.¹

Dinamika sosial politik yang terjadi dalam perkembangan kebijakan, hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Hindia Belanda pada era Pemerintahan kolonial Hindia Belanda, memberikan gambaran perubahan dan pembaruan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Perkembangan tahapan-tahapan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalisme yang mencoba membuka peluang lebar untuk menerapkan model-model Eropa guna diterapkan di daerah jajahan. Namun, kebijakan yang juga alih-alih hendak menjamin perlindungan kepentingan penduduk Bumiputera, justru menghasilkan pola-pola kebijakan yang memprioritaskan kepentingan kolonial.²

Pada awal abad ke-20 M pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik Etis terhadap pribumi. Kebijakan itu membawa perubahan corak pergerakan masyarakat Nusantara yang ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pergerakan yang memiliki tujuan dan langkah-langkah yang lebih terstruktur, dan terorganisir dan menjadi sebuah model pergerakan baru yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah pergerakan nasional di Nusantara. Salah satunya adalah Sarekat Islam³ yang perjuangannya menjalar ke berbagai gerakan-gerakan yang lainnya.

Sarekat Islam adalah organisasi politik Nusantara yang lahir pada awal abad ke-20 M, organisasi Islam tertua di Nusantara dan paling menonjol pada masanya. Gerakan politik Sarekat Islam (SI) adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh H. Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. SDI mula-mula diarahkan melawan kegiatan Cina yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi, Di sisi lain adalah perlawanan tidak langsung ditujukan kepada pemerintahan kolonial Belanda yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina yang agresif dalam perdagangan dan industri. Pada tahun 1912 SDI berubah menjadi SI dan mendapatkan pemimpin organisator baru yang kompeten⁴ yaitu HOS Tjokroaminoto. Munculnya gerakan organisasi Sarekat Islam sebagai gerakan politik menjadi

¹ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta : Pustaka Jaya, 1980, hal. 32

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: HuMaJakarta, Van Vollenhoeven Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014), hal. 15.

³ Tsabit Azinar Ahmad, "Sarekat Islam Dan Gerakan Kiri Di Semarang 1917-1920," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 8, no.2 (2014): 225.

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3S, Cetakan ketiga, 1996), h. 79

titik awal atau pelopor tumbuhnya berbagai gerakan-gerakan politik menjadi kelanjutan dari perjuangan bumiputera dalam upaya dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada sejarah dan pergerakan Sarekat Islam sejak berdirinya sebagai Sarekat Dagang Islam (SDI) oleh Haji Samanhudi tahun 1905 hingga transformasinya menjadi gerakan politik Islam di bawah H.O.S. Tjokroaminoto. Penelitian ini juga menelaah dinamika perjuangan Sarekat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan politik, baik secara kooperatif melalui Volksraad maupun non-kooperatif lewat aksi massa dan propaganda, sebagai wujud peran pentingnya dalam membangkitkan kesadaran nasional dan menentang kolonialisme Belanda.

LANDASAN TEORI

Dalam memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh Sarekat Islam (SI), teori Herbert Spencer tentang model evolutif memberikan pandangan bahwa perubahan sosial berlangsung secara bertahap, teratur, dan bersifat internal. Konsep ini dapat diterapkan pada perjalanan SI yang awalnya lahir sebagai gerakan ekonomi melalui Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, kemudian berevolusi menjadi gerakan sosial-politik Islam yang lebih terorganisir di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912. Perubahan ini menunjukkan proses evolusi sosial di mana organisasi yang semula fokus pada perlindungan pedagang pribumi, berkembang menjadi wadah perjuangan rakyat untuk keadilan, kesetaraan, dan kemerdekaan nasional. Dengan demikian, transformasi SI mencerminkan pola perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan alami seiring meningkatnya kesadaran politik umat Islam terhadap penindasan kolonial.

Sementara itu, teori Karl Marx dengan model konflik menekankan bahwa perubahan sosial sering kali muncul akibat benturan kepentingan dan pertentangan ideologi di dalam masyarakat. Perspektif ini tampak jelas dalam dinamika internal Sarekat Islam, terutama pada masa 1920-an ketika muncul perpecahan antara kelompok SI Putih yang tetap berhaluan Islam dan SI Merah yang terpengaruh ideologi komunis. Pertentangan ideologis ini menjadi motor penggerak perubahan yang mendorong SI melakukan penyesuaian arah perjuangan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tujuan nasionalisme. Konflik tersebut bukan hanya menandai perbedaan pandangan politik, tetapi juga mencerminkan proses dialektika sosial yang memperkuat identitas keislaman SI sekaligus menguji ketahanannya sebagai organisasi politik modern.

Teori Quintan Wiktorowicz tentang gerakan sosial Islam membantu menjelaskan bagaimana SI mampu berkembang pesat melalui tiga aspek utama: struktur peluang politik, proses pembingkaihan (framing), dan mobilisasi sumber daya. SI tumbuh di tengah terbukanya peluang politik akibat kebijakan Politik Etis dan pembentukan Volksraad, yang memberi ruang bagi organisasi pribumi untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam proses pembingkaihan, SI menggunakan ajaran Islam sebagai kerangka ideologis yang menegaskan bahwa perjuangan melawan kolonialisme adalah bagian dari jihad menegakkan keadilan. Selain itu, SI juga mampu memobilisasi jaringan sosial, ekonomi, dan keagamaan—melalui pedagang, ulama, serta media seperti Oetoesan Hindia sehingga menjadi gerakan sosial Islam yang memiliki basis massa luas dan legitimasi kuat di kalangan rakyat.

Sedangkan teori Charles Tilly mengenai mobilisasi politik menyoroti empat unsur penting dalam gerakan sosial, yakni kepentingan bersama, organisasi, mobilisasi, dan peluang politik. Dalam konteks SI, keempat unsur ini tampak dalam semangat perjuangan rakyat pribumi untuk menentang diskriminasi kolonial (kepentingan bersama), struktur organisasi yang teratur dari pusat hingga daerah (organisasi), kemampuan menggerakkan massa melalui rapat umum dan propaganda (mobilisasi), serta pemanfaatan situasi politik yang terbuka pada awal abad ke-20 (peluang politik). Dengan demikian, melalui kerangka Tilly, Sarekat Islam dapat dipahami sebagai gerakan politik yang mampu mengorganisir aspirasi rakyat secara modern, menggabungkan nilai keislaman dengan strategi politik, dan menjadi pelopor kebangkitan nasional Indonesia.⁵

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian sejarah** melalui empat tahap:

1. **Heuristik:** pengumpulan sumber primer (arsip, surat kabar, notulen SI) dan sekunder (literatur sejarah pergerakan nasional).
2. **Kritik sumber:** menilai keaslian dan kredibilitas dokumen kolonial serta tulisan tokoh SI.
3. **Interpretasi:** menganalisis transformasi ideologi dan strategi politik dengan kerangka teori sosial.

⁵ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Ann Arbor: Center for Research on Social Organization, University of Michigan, 1977)

4. **Historiografi:** menyusun narasi sistematis mengenai peran SI di Jawa.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk-bentuk Perlawanan Sarekat Islam

Sarekat Islam (SI) muncul sebagai salah satu organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan strategi politik dan propaganda secara sistematis untuk melawan kolonialisme Belanda di Jawa. Gerakan ini tidak hanya mengandalkan perlawanan fisik, tetapi juga membangun kesadaran massa melalui agitasi politik, pendidikan, dan mobilisasi rakyat. Berikut penjelasan mendalam tentang bentuk perlawanan politik dan propaganda SI di Jawa.⁷

1) Strategi Politik (1910-1934)

a. Fase Kooperasi (1910-an)

Pada awal berdirinya, SI cenderung bersifat kooperatif dengan memanfaatkan saluran-saluran resmi yang disediakan pemerintah kolonial. Beberapa tokoh SI, seperti Abdul Muis, bahkan duduk di Volksraad (Dewan Rakyat) untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur diplomasi. Mereka berupaya mendesak kebijakan yang lebih adil, seperti penghapusan pajak yang memberatkan dan perluasan kesempatan pendidikan bagi pribumi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena Volksraad hanya bersifat konsultatif tanpa kekuasaan legislatif nyata, sehingga tuntutan SI sering diabaikan oleh pemerintah kolonial.⁸

b. Fase Non-Kooperasi (Pasca-1921)

Seiring waktu, terutama setelah tahun 1921, SI mulai beralih ke strategi non-kooperasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Belanda yang represif dan tidak mengakomodasi aspirasi rakyat. Pergeseran ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: kegagalan jalur diplomasi dan masuknya pengaruh ideologi radikal dari kalangan sosialis-komunis. SI Putih, di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, menolak kerja sama dengan Belanda dan lebih memilih menguatkan basis massa

⁶ Anwar Sanusi. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013.

⁷ Wasisto Raharjo Jati, "Gerakan Populis Islam: Analisis Strategi Mobilisasi Sarekat Islam di Jawa 1912-1926", *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 6, no. 1 (2021), hlm, 45.

⁸ M. Nursam, "Sarekat Islam dan Politik Kooperasi pada Masa Pergerakan Nasional," *Jurnal Sejarah dan Budaya* 14, no. 1 (2020), hal, 48.

melalui pendidikan politik dan penguatan ekonomi mandiri. Sementara itu, SI Merah, yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Semaun dan Darsono, mengadopsi strategi perlawanan lebih keras dengan menggalang aksi-aksi pemogokan dan protes massa. Perpecahan ini akhirnya melemahkan SI secara keseluruhan, tetapi strategi non-kooperasinya memberikan warisan penting bagi gerakan nasionalis berikutnya, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), yang juga menolak kerja sama dengan kolonialis.⁹

2) Mobilisasi Massa & Penyebaran Ideologi Anti Kolonial

Sarekat Islam (SI) memainkan peran kunci dalam membangun kesadaran politik rakyat melalui mobilisasi massa secara sistematis. Salah satu strategi utama SI adalah menggalang kekuatan rakyat melalui rapat-rapat umum, pidato propagandis, dan pendidikan politik. Tokoh-tokoh karismatik seperti H.O.S. Tjokroaminoto berkeliling Jawa dan Sumatra, menyampaikan pidato yang membakar semangat anti-kolonial.¹⁰

Sarekat Islam tidak hanya berfokus pada protes, tetapi juga pembangunan alternatif. Mereka mendirikan koperasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum untuk anggota yang tertindas sistem kolonial. Dengan cara ini, SI tidak sekadar melawan Belanda, tetapi membentuk tatanan masyarakat baru yang mandiri dan egaliter. Perlawanan sosial SI menjadi fondasi penting bagi gerakan nasionalis berikutnya, menunjukkan bahwa perubahan bisa dicapai melalui organisasi rakyat yang kuat dan ideologi yang mengakar.

Sarekat Islam berhasil menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, dengan anggota mencapai lebih dari 2 juta orang di Jawa. Kekuatan utama SI terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai lapisan masyarakat mulai dari petani, buruh, pedagang, hingga ulama melalui narasi perlawanan berbasis Islam dan nasionalisme.¹¹

3) Tuntutan Politik & Diplomasi

SI tidak hanya bergerak di tingkat akar rumput, tetapi juga melakukan tekanan politik terhadap pemerintah kolonial melalui jalur diplomasi dan petisi.

- a. Indië Weerbaar (1917): SI terlibat dalam gerakan Indië Weerbaar (Pertahanan Hindia) yang awalnya didukung Belanda untuk merekrut pribumi sebagai tentara dalam Perang

⁹ Ahmad Fauzi, "Pergeseran Strategi Sarekat Islam dari Kooperasi ke Non-Kooperasi: Analisis Perpecahan SI Putih dan SI Merah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2018), hlm, 115.

¹⁰ Politiek Inlichtingen Dienst, "Rapport over de Sarekat Islam vergadering te Soerabaja" [Laporan tentang Rapat Sarekat Islam di Surabaya], 12 Oktober 1921. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën, 2.10.36.04, inv.nr. 647.

¹¹ Chiara Formichi, "From Religious to Political Activism: The Transformation of Sarekat Islam in Java", *Studia Islamika* 19, no. 3 (2012), hlm, 455-490.

Dunia I. Namun, SI memanfaatkannya untuk menuntut hak otonomi politik sebagai imbalan.

- b. Volksraad (Dewan Rakyat): Beberapa tokoh SI seperti Abdul Muis masuk ke Volksraad (lembaga semu-parlemen bentukan Belanda) untuk memperjuangkan hak-hak pribumi. Meski Volksraad tidak memiliki kekuatan nyata, kehadiran SI di dalamnya menjadi alat propaganda untuk mengekspos kebobrokan sistem kolonial.
- c. Volksraad (Dewan Rakyat): Beberapa tokoh SI seperti Abdul Muis masuk ke Volksraad (lembaga semu-parlemen bentukan Belanda) untuk memperjuangkan hak-hak pribumi. Meski Volksraad tidak memiliki kekuatan nyata, kehadiran SI di dalamnya menjadi alat propaganda untuk mengekspos kebobrokan sistem kolonial.

4) Konfrontasi dengan Pemerintah Kolonial

Belanda melihat SI sebagai ancaman serius dan mulai melakukan represi. Namun, SI merespons dengan strategi yang lebih radikal.

- a. Pemogokan & Aksi Protes: SI mendukung pemogokan buruh di industri gula (seperti di Surabaya dan Semarang) serta aksi protes petani terhadap penyewaan tanah oleh pengusaha Belanda. Salah satu yang terkenal adalah Pemberontakan Toli-Toli (1919) yang dipicu oleh kesewenang-wenangan Belanda.
- b. Pembentukan Laskar Rakyat: Beberapa cabang SI di Jawa Tengah dan Timur membentuk kelompok perlawanan semi-militer, meski tidak sebesar laskar Hizbullah di masa revolusi.

B. Dampak & Warisan Perlawanan Politik Sarekat Islam

1. Pelopor Organisasi Massa Modern

Sarekat Islam (SI) menciptakan terobosan sebagai organisasi massa pertama yang menerapkan struktur modern. Berbeda dengan organisasi sebelumnya seperti Budi Utomo yang bersifat elitis, SI membangun sistem keanggotaan terbuka untuk seluruh lapisan pribumi. Pada puncaknya tahun 1916, SI telah membentuk jaringan cabang di 120 kota dengan sistem administrasi terpusat yang rapi. Mekanisme demokratis dijalankan melalui kongres tahunan dan pemilihan pengurus secara berkala, menjadi model bagi organisasi pergerakan selanjutnya.¹²

2. Pembentukan Kesadaran Nasional

¹² Fahmi, M. (2020). *Struktur Organisasi Sarekat Islam dan Pengaruhnya terhadap Pergerakan Nasional*. Jurnal Sejarah Indonesia, 3(2), hlm, 45-62.

SI memainkan peran kunci dalam memupuk kesadaran kebangsaan Indonesia. Organisasi ini secara sistematis memperkenalkan konsep "bangsa Indonesia" melalui media-media yang dikelolanya, dengan Islam sebagai identitas pemersatu. Basis massa SI yang multiklas - mencakup pedagang, petani, buruh, dan ulama - menciptakan ruang dialog antar kelompok yang sebelumnya terpisah. Melalui sekolah-sekolah SI, ceramah keliling, dan 16 surat kabar berbahasa Melayu, mereka menyebarkan pemikiran anti-kolonial dan ekonomi kerakyatan.¹³

3. Transformasi Strategi Perjuangan

Perkembangan strategi perjuangan SI menunjukkan evolusi yang dinamis. Pada fase awal (1912-1916), SI mengutamakan pendekatan kooperatif melalui Volksraad dan pengajuan petisi. Periode 1917-1921 menandai radikalisme dengan aksi-aksi pemogokan dan boikot ekonomi. Pasca 1921, SI beralih ke strategi non-kooperasi penuh dengan membentuk pemerintahan mandiri simbolis. Inovasi gerakan SI mencakup boikot ekonomi pertama terhadap kapitalis asing, sistem kaderisasi politik terstruktur, serta aliansi strategis dengan organisasi seperti Muhammadiyah.¹⁴

C. Strategi Politik Sarekat Islam

Sarekat Islam (SI) menjadi salah satu organisasi modern pertama di Hindia Belanda yang berhasil melakukan mobilisasi massa dalam skala besar. Kemampuannya menghimpun ratusan ribu anggota pada dekade 1910–1920-an menjadikannya pionir dalam menggerakkan rakyat pribumi melawan ketidakadilan kolonial. Strategi mobilisasi yang ditempuh SI bersifat kompleks: mencakup metode rekrutmen, penggunaan simbol keagamaan, jaringan cabang yang luas, serta pemanfaatan media dan pendidikan politik. Semua ini menjadikan SI bukan sekadar organisasi ekonomi atau sosial, melainkan gerakan politik dengan basis akar rumput yang kuat¹⁵

1. Rekrutmen dan Jaringan Cabang

Pada fase awal, SI menarik anggota terutama dari kalangan pedagang Muslim. Namun setelah memperoleh pengakuan resmi sebagai organisasi nasional pada 1916,

¹³ Nugroho, B. & Prasetyo, D. (2022). Media Massa sebagai Alat Perjuangan Sarekat Islam. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(3), hlm, 201-218.

¹⁴ Nugroho, B. & Prasetyo, D. (2022). Media Massa sebagai Alat Perjuangan Sarekat Islam. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(3), hlm, 201-218.

¹⁵ M. Kurniawati, *Sejarah Berdirinya Sarekat Islam pada Tahun 1912* (Jurnal Ilmiah, 2021), 6–7

SI memperluas jangkauan ke petani, buruh, guru, dan santri.⁽¹⁾ Rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan menekankan identitas keislaman sebagai basis solidaritas. Identitas ini penting karena menumbuhkan rasa persaudaraan umat (ukhuwah Islamiyah), sehingga keanggotaan tidak hanya dipandang sebagai langkah politik, tetapi juga ibadah dan bentuk kesetiaan terhadap agama.

2. Rapat Umum dan Orasi Politik

Salah satu strategi mobilisasi terpenting SI adalah melalui rapat umum. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto dikenal sebagai orator ulung yang mampu memikat ribuan orang. Rapat umum ini tidak hanya menjadi sarana sosialisasi program organisasi, tetapi juga menjadi panggung untuk membangkitkan kesadaran politik rakyat. Orasi Tjokro sering mengaitkan penderitaan ekonomi dengan pesan moral Islam, sehingga isu kolonialisme dipandang bukan sekadar masalah politik, tetapi juga ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip agama.¹⁶

3. Pers dan Media Organisasi

Selain rapat umum, SI menggunakan media pers untuk memperluas mobilisasi. Surat kabar *Oetoesan Hindia* dan media lain yang dikelola kader SI menjadi alat penting dalam menyebarkan gagasan. Pers digunakan untuk mengkritik kebijakan kolonial, menyebarkan ide kesetaraan, dan membangkitkan rasa percaya diri di kalangan pribumi. Media ini juga berfungsi membangun imaji kolektif umat Islam sebagai kekuatan politik. Dengan membaca berita tentang rapat umum di kota lain atau pidato tokoh nasional, anggota SI di daerah merasa menjadi bagian dari gerakan besar. Inilah yang menjadikan SI bukan hanya organisasi lokal, tetapi kekuatan nasional yang terhubung melalui jaringan informasi.¹⁷

4. Pendidikan Politik dan Kaderisasi

Mobilisasi anggota tidak hanya mengandalkan massa, tetapi juga kaderisasi. SI mendirikan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk membekali generasi muda dengan wawasan agama dan politik. Pendidikan ini menekankan bahwa Islam tidak hanya soal ritual, tetapi juga pedoman dalam memperjuangkan keadilan sosial. Kaderisasi penting karena memperkuat keberlangsungan organisasi. Banyak tokoh

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ F. Rini, *Nilai-Nilai Perjuangan Sarekat Islam dalam Mewujudkan Kemerdekaan Indonesia sebagai Penguatan Pendidikan Karakter* (Jambi: Universitas Jambi, 2022), 8–9

pergerakan nasional generasi berikutnya, seperti Sukarno, pernah mendapat inspirasi dari pendidikan politik yang disebarkan melalui jaringan SI. Dengan demikian, mobilisasi anggota SI bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas kader yang siap melanjutkan perjuangan.¹⁸

5. Simbolisme Islam Sebagai Pengikat Masa

Islam menjadi simbol utama dalam mobilisasi SI. Identitas ini melampaui batas etnis, kelas, dan wilayah, sehingga rakyat Jawa dapat bersatu dalam bingkai keagamaan. Simbolisme Islam membuat mobilisasi SI lebih efektif dibanding organisasi lain yang hanya mengandalkan identitas kedaerahan atau kelas sosial.

Mobilisasi yang dilakukan SI juga menciptakan tradisi baru dalam politik Indonesia: keterlibatan massa sebagai subjek politik. Tradisi ini kemudian diwarisi oleh organisasi nasionalis lainnya, termasuk PNI dan partai-partai Islam pasca kemerdekaan. Dengan demikian, strategi mobilisasi SI bukan hanya berhasil dalam konteks kolonial, tetapi juga meninggalkan warisan penting bagi sejarah politik Indonesia.¹⁹

D. Perlawanan Politik Terhadap Kolonialisme

Sarekat Islam (SI) tidak hanya bergerak sebagai organisasi massa yang mampu memobilisasi ribuan anggota, tetapi juga tampil sebagai kekuatan politik yang berhadapan langsung dengan kekuasaan kolonial. Dalam menjalankan perjuangannya, SI mengembangkan dua jalur utama: strategi kooperatif, yaitu dengan memanfaatkan ruang politik yang disediakan pemerintah kolonial, dan strategi non-kooperatif, yaitu dengan menolak kompromi dan menempuh jalur aksi massa. Kedua strategi ini tidak selalu berjalan beriringan, bahkan sering kali menimbulkan perdebatan internal yang tajam. Namun, keduanya menjadi bukti bahwa SI mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kolonialisme Hindia Belanda.²⁰

1. Strategi Kooperatif

Strategi kooperatif SI tampak jelas ketika pemerintah Belanda membentuk Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1918 sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bersifat konsultatif. Walaupun kewenangannya terbatas, sejumlah tokoh SI memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Tokoh seperti Abdul Muis dan H. Agus Salim duduk di Volksraad dan menjadi corong kritik terhadap kebijakan kolonial. Di

¹⁸ C. Nuryansyah, *Perubahan Sarekat Islam 1912–1916* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Repository, 2021), 34–35

¹⁹ Rini, *Op.Citt.*, 12-13

²⁰ Z. Latifah, *Sarekat Islam Pelopor Gerakan Kebangsaan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Repository, 2020), 20–21

dalam Volksraad, Agus Salim menekankan bahwa rakyat pribumi berhak memperoleh pendidikan yang setara, partisipasi politik yang lebih luas, serta perlindungan terhadap kepentingan ekonomi rakyat kecil. Meskipun gagasan-gagasannya sering diabaikan oleh pemerintah kolonial, keterlibatan tokoh SI di Volksraad menjadi penting karena memperkenalkan model politik diplomasi dalam perjuangan bangsa. Strategi Non-kooperatif

Di sisi lain, berkembang pula strategi non-kooperatif. Sejak awal 1920-an, SI semakin menyadari keterbatasan Volksraad yang hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat tanpa kekuasaan legislatif. Kekecewaan terhadap jalur diplomasi mendorong SI mengambil sikap non-kooperatif, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam jalur non-kooperatif ini, SI memusatkan perlawanan pada aksi massa. Rapat umum dijadikan sarana utama untuk mengobarkan semangat anti-kolonial. Tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto menggelar orasi yang menyamakan perjuangan melawan Belanda dengan jihad melawan ketidakadilan. Pidatonya mampu memobilisasi ribuan orang di berbagai kota Jawa. Strategi ini memberi dampak besar: rakyat kecil yang sebelumnya apatis mulai menyadari bahwa kolonialisme adalah sumber penderitaan yang harus dilawan.²¹

Perlawanan politik SI terhadap kolonialisme menunjukkan kemampuan organisasi ini dalam memanfaatkan berbagai saluran perjuangan. Strategi kooperatif memberi pengalaman politik baru melalui Volksraad, meskipun dibatasi oleh kolonial. Sementara strategi non-kooperatif membangkitkan kesadaran politik massa dan memperkenalkan bentuk perlawanan langsung. Keduanya tidak selalu berjalan harmonis, namun justru menunjukkan kompleksitas SI sebagai organisasi politik Islam modern. Koeksistensi strategi ini juga mencerminkan dilema yang dihadapi SI: apakah harus menempuh jalur kompromi untuk memperoleh keuntungan kecil namun legal, atau menempuh jalur radikal dengan risiko represi kolonial. Dampak bagi Masyarakat Pribumi Indonesia.

Sarekat Islam (SI) memberikan dampak yang luas bagi masyarakat pribumi Hindia Belanda, terutama dalam dimensi politik, sosial, dan kultural-religius. Pada bidang politik, SI berhasil menumbuhkan kesadaran baru bahwa rakyat kecil memiliki hak untuk terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Jika sebelumnya politik modern lebih terbatas pada kalangan priyayi dan kaum terdidik, maka SI membuka

²¹ *Ibid*, 122

ruang partisipasi yang lebih luas dengan melibatkan pedagang kecil, petani, buruh, dan santri. Kehadiran rapat umum dan pidato tokoh-tokoh SI, khususnya Tjokroaminoto, mampu menyadarkan massa bahwa kolonialisme adalah sumber utama penderitaan mereka dan bahwa keterlibatan politik merupakan kewajiban umat Islam. Dalam konteks ini, SI berperan penting sebagai pelopor demokratisasi awal politik di Hindia Belanda dengan memperluas arena politik yang sebelumnya eksklusif menjadi inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.²²

Dampak kultural-religius SI juga sangat signifikan. Islam yang sebelumnya lebih dipandang sebatas agama ritual, oleh SI diproyeksikan sebagai ideologi perjuangan melawan kolonialisme. Retorika Tjokroaminoto yang menyamakan perlawanan terhadap Belanda dengan jihad menjadikan keanggotaan dalam SI tidak hanya sebagai aktivitas politik, tetapi juga ibadah. Dengan demikian, SI berhasil mentransformasikan identitas Islam menjadi kekuatan politik kolektif yang mengikat masyarakat lintas kelas dan etnis. Hal ini memunculkan kesadaran baru bahwa agama dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan kebangsaan, sebuah warisan penting bagi pergerakan Islam dan nasionalisme Indonesia setelahnya.

Kesimpulan

Sarekat Islam (SI) bermula dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 1911 untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi ekonomi pedagang Tionghoa. Di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, organisasi ini bertransformasi dari gerakan ekonomi menjadi gerakan politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan menentang kolonialisme Belanda. Sejak diakui secara nasional pada 1916, SI menjadi wadah utama bagi rakyat pribumi untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan melalui kegiatan politik, dakwah, serta media seperti *Oetoesan Hindia*.

Pada periode 1916–1934, dinamika gerakan SI terlihat melalui perjuangan politik dan sosialnya dalam membangkitkan kesadaran nasional. SI aktif mengadakan rapat umum, pendidikan politik, serta melahirkan tokoh-tokoh penting seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Soekarno. Meski sempat melemah akibat perpecahan antara SI Putih dan SI Merah serta tekanan kolonial, Sarekat Islam tetap meninggalkan warisan besar berupa semangat nasionalisme Islam dan model perjuangan modern yang berperan penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia.

²² M. Kurniawati, *Sejarah Berdirinya Sarekat Islam pada Tahun 1912* (Jurnal Ilmiah, 2021), 6–7

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi, "Pergeseran Strategi Sarekat Islam dari Kooperasi ke Non-Kooperasi: Analisis Perpecahan SI Putih dan SI Merah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (2018),
- Ahmad, Tsabit Azinar. "Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917–1920." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8, no. 2 (2014)
- Anwar Sanusi. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013.
- Benda, H. J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Ann Arbor: Center for Research on Social Organization, University of Michigan, 1977)
- Fahmi, M. "Struktur Organisasi Sarekat Islam dan Pengaruhnya terhadap Pergerakan Nasional." *Jurnal Sejarah Indonesia* 3, no. 2 (2020)
- Formichi, Chiara. "From Religious to Political Activism: The Transformation of Sarekat Islam in Java." *Studia Islamika* 19, no. 3 (2012)
- Jati, Wasisto Raharjo. "Gerakan Populis Islam: Analisis Strategi Mobilisasi Sarekat Islam di Jawa 1912–1926." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 6, no. 1 (2021)
- Kurniawati, M. *Sejarah Berdirinya Sarekat Islam pada Tahun 1912*. Jurnal Ilmiah, 2021.
- Latifah, Z. *Sarekat Islam Pelopor Gerakan Kebangsaan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Repository, 2020.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3S, 1996.
- Nugroho, B. & Prasetyo, D. (2022). Media Massa sebagai Alat Perjuangan Sarekat Islam. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(3)
- Nuryansyah, C. *Perubahan Sarekat Islam 1912–1916*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Repository, 2021.
- Nursam, M. "Sarekat Islam dan Politik Kooperasi pada Masa Pergerakan Nasional." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 14, no. 1 (2020)
- Politiek Inlichtingen Dienst, "Rapport over de Sarekat Islam vergadering te Soerabaja" [Laporan tentang Rapat Sarekat Islam di Surabaya], 12 Oktober 1921. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën, 2.10.36.04
- Rini, F. *Nilai-Nilai Perjuangan Sarekat Islam dalam Mewujudkan Kemerdekaan Indonesia sebagai Penguatan Pendidikan Karakter*. Jambi: Universitas Jambi, 2022

Quintan Wiktorowicz, "Islamic Activism and Social Movement Theory: A New Direction for Research," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 22, no. 1 (2005):

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014.